



PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Kompleks Pengadilan Terpadu, Jl. Prof. Dr. Mr. RSE Koesoemah Atmadja,

Kel. Kima Atas, Kec. Mapanget, Manado 95259, Telp (0431) 858322

Website : www.pta-manado.go.id - Email: pta.manado@gmail.com

Nomor : W18-A/3²²/OT.01.2/4/2022

5 April 2022

Lampiran :

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tahuna dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

Jawaban	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Agama Tahuna memperoleh nilai sebesar **77,18 (BB)** atau **Sangat Baik**.
5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30 % nilai yang diperoleh 28,35% :

- 1) Dokumen Renstra, dokumen RKT dan dokumen PK yang dibuat terdapat keselarasan antara dokumen satu dengan dokumen lainnya. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, target sudah ditetapkan dengan baik, indikator kinerja telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 2) Dokumen Renstra menyajikan IKU yang mencantumkan core bisnis dan bisnis/supporting unit serta mencantumkan target.
- 3) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK) dan sudah digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran.
- 4) Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, sudah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta target kinerja yang diperjanjikan sudah digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.

b. Pengukuran Kinerja = Bobot 25% nilai yang diperoleh 15,20% :

- 1) Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU telah menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan indikator kinerja sasaran dapat diukur secara objektif, pengumpulan data kinerja sudah dapat diandalkan dan dilakukan secara berkala.
- 3) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, sudah direviu secara berkala namun belum digunakan sepenuhnya untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 11,75% :

- 1) LKjIP telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome, sudah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, sudah menyajikan informasi yang telah diperjanjikan serta evaluasi dan analisis mengenai pencapaian kinerja.

- 2) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, sudah menyajikan informasi keuangan perkara yang dibiayai para pihak dan informasi kinerja dalam LKjIP sudah dapat diandalkan.
- 3) Informasi yang disajikan dalam LKjIP sudah digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta belum digunakan untuk meningkatkan dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal = Bobot 10% nilai yang diperoleh **6,88 %** :

- 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- 2) Monitoring dan evaluasi memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.

e. Pencapaian Kinerja= Bobot 20% nilai yang diperoleh **15,00%** :

Target kinerja output dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, informasi mengenai kinerja dapat diandalkan, target outcome telah tercapai serta informasi mengenai kinerja outcome dapat diandalkan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Meningkatkan keselarasan dokumen renstra dan RKT serta PK dengan meningkatkan tujuan dan sasaran sehingga berorientasi pada hasil. Agar di dalam dokumen renstra agar memuat strategi pemenuhan kebutuhan stakeholder serta juga disajikan matrik pendanaan.
- 2) Meningkatkan keselarasan antara dokumen Renstra dan dokumen perencanaan kinerja tahunan serta menyelaraskan dokumen PK dengan RKT agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran (RKA) serta dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas IKU sebagai ukuran kinerja secara formal dengan menyempurnakan indikator kinerja agar dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya serta meningkatkan kinerja selanjutnya.
- 2) Meningkatkan kualitas dan implementasi pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dan pengukuran agar dapat digunakan untuk mengendalikan dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Meningkatkan penyajian informasi kinerja dalam LKjIP dengan evaluasi dan analisa

- yang lebih mendalam serta lebih menyempurnakan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada output/outcome, sehingga informasi kinerja lebih diandalkan.
- 2) Meningkatkan informasi perbandingan data kinerja yang memadai dalam LKJIP antara antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja serta dapat digunakan untuk peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Agar dilakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- 2) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.

e. Pencapaian Kinerja

Agar meningkatkan capaian kinerja output/outcome sehingga capaian kinerja output/outcome lebih baik dari tahun sebelumnya dan memperbaiki informasi kinerja output/outcome sehingga dapat diandalkan.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tahuna tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Tahuna.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum, Wr.Wb


Ketu.
/ISKANDAR PAPUTUNGAN

Tembusan Yth:

1. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI